

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Rasyid Thalib, et. all. 2006. *Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Aplikasinya dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Adrian Sutedi. 2015. *Hukum Perizinan dalam Sektor Pelayanan Publik*. Cet. 3. Jakarta: Sinar Grafika.
- _____. 2017. *Hukum Pertambangan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ani Sri Rahayu. 2018. *Pengantar Pemerintahan Daerah (Kajian Teori, Hukum, dan Aplikasinya)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ateng Syafrudin. 1983. *Pasang Surut Otonomi Daerah*. Bandung: Orasi Disertasi Unpar.
- Eny Kusdarini. 2011. *Dasar-Dasar Hukum Administrasi Negara Dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik*. Yogyakarta: UNY Press.
- Gatot Supramono. 2016. *Hukum Pertambangan Mineral Dan Batubara Di Indonesia*. Jakarta: Rhineka Cipta.
- Indroharto. 1989. *Usaha Memahami Undang Undang Tentang Tata Usaha Negara*. Jakarta: Sinar Harapan.
- Irwansyah. 2021. *Penelitian Hukum: Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel*. Yogyakarta: Mirra Buana Media.
- Ishaq. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Jimmy Asshiddiqie. 2006. *Perihal Undang-Undang*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Muhammad Arthur. 2012. *Menggugah Peran Aktif Masyarakat dalam Otonomi Daerah*. Jakarta: PT. Raja Drafindo Persada.
- Nandang Alamsah, dkk. *Teori & Praktek Kewenangan Pemerintahan*. Bandung: Unpad Press.
- Nur Basuki Winarno. 2008. *Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi*. Yogyakarta: Laksbang Mediatama.
- Peter Mahmud Marzuki. 2013. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenadia Media.
- R. Soeroso. 2006. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

- Salim HS. 2018. *Hukum Penyelesaian Sengketa Pertambangan di Indonesia*. Bandung: Pustaka Reka Cipta.
- Sarkawi. 2013. *Hukum Administrasi Negara*. Mataram: Pustaka Bangsa.
- SF. Marbun. 1997. *Hukum Administrasi dan Peradilan Administrasi di Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.
- Sirajuddin. dkk. 2018. *Hukum Administrasi Pemerintahan Daerah; Sejarah. Asas. Kewenangan. dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. Malang: Setara Press.
- Sri Kusriyah. 2019. *Politik Hukum Desentralisasi & Otonomi Daerah dalam Perspektif Negara Kesatuan Republik Indonesia*. Semarang: Unissula Press.
- Sukanto Satoto. 2004. *Pengaturan Eksistensi dan Fungsi Badan Kepegawaian Negara*. Yogyakarta: Hanggar Kreator.
- WJS Poerwadarminta. 1985. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Cetakan Kedelapan. Jakarta: Balai Pustaka.

B. Jurnal/Karya Ilmiah/Internet

- Afif Syarif. 2019. “Model Pengelolaan Pertambangan Batubara Berbasis Penguatan Kelembagaan Masyarakat Adat di Kabupaten Bungo”. *Jurnal Sains Sosio Humaniora*.
- Akil Mochtar. *Kewenangan Pusat Dan Daerah Dalam Pembangunan Daerah Di Era Otonomi*. www.akilmochtar.com. diakses tanggal 14 Februari 2023.
- Aridhayandi. M. Rendi.. “Peran Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Pemerintahan Yang Baik (*Good Governance*) Dibidang Pembinaan dan Pengawasan Indikasi Geografis”. *Jurnal Hukum & Pembangunan Volume 48 Nomor 4*.
- Arman Nefi. Irawan Malebra. Dyah Puspitasari Ayuningtyas. 2018. “Implikasi Keberlakuan Kontrak Karya PT. Freeport Indonesia Pasca Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara”. *Jurnal Hukum dan Pembangunan Volume 48 Nomor 1*.
- D. Djambar. 2017. “Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Pertambangan Dalam Perspektif Otonomi Daerah”. *Katalogis Volume 5 Nomor 2*.
- Darwis Manurung. 2019. “Implikasi Hukum Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Pemberian Izin Usaha Pertambangan Menurut Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2014”. *Prosiding Seminar Nasional Ke-3*. Fakultas Hukum Universitas Borneo. Tarakan.

Ennandrianita. 2015. “Politik Hukum Pertambangan Mineral Dan Batubara Saat Berlaku Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah”. *Jurnal Ilmu Hukum*.

Epi Syahadat. dkk. 2018. “Sinkronisasi Kebijakan di Bidang Izin Pertambangan dalam Kawasan Hutan”. *Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Volume 1 Nomor 15*.

Faisal dan Derita Prapti Rahayu. 2021. “Eksistensi Pertambangan Rakyat Pasca Pemberlakuan Perubahan Undang-Undang Tentang Pertambangan Mineral dan Batuba”. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Volume 3 Nomor 3*.

Faisal dan Derita Prapti Rahayu. 2021. “Tujuan Pemidanaan Undang-Undang Minerba Dalam Perspektif Kebijakan Kriminalisasi”. *Bina Hukum Lingkungan Volume 5 Nomor 2*.

Helmi. 2011. “Kedudukan Izin Lingkungan dalam Sistem Perizinan di Indonesia”. *Jurnal Ilmu Hukum Nomor 2*.

<http://ppkl.menlhk.go.id/website/silat/assets/filebox/28/181101064946Panduan%20Pelembagaan%20Tambang%20Rakyat%202015.pdf>

Iwan Harianto. 2013. “Sengketa Usaha Pertambangan Di Wilayah Hutan Elang Dodo Kabupaten Sumbawa”. *Jurnal Magister Hukum Udayana Volume 2 Nomor 1*.

Jailani Syamsudin dan Siti Fatimah. 2023. “Pengalihan Kewenangan Perizinan Usaha Pertambangan dalam Undang-Undang Mineral dan Batubara Perspektif Desentralisasi”. *Jurnal Tana Mana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Volume 4 Nomor 1*.

Josef Mario Monteiro. 2016. *Hukum Pemerintahan Daerah*. Pustaka Yustisia. Yogyakarta.

Leko Karjoko. et. all. 2019. “Disfungsi Peraturan Perundang-Undangan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan di Indonesia”. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum Volume 26 Nomor 2*.

Lineke Baura, Marthinus Johannes Saptanno, Jemmy Jeffrey Pietersz. 2022. “Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Pertambangan Mineral Batubara”. *PATTIMURA Legal Journal*.

Maria Farida dan Indrati Suprato. 2007. *Ilmu Perundang-Undangan (Jenis, Fungsi dan Muatan)*. Konisius. Yogyakarta.

- Mohammad Hatta. 2014. *Kedaulatan Rakyat. Otonomi & Demokrasi*. Cet. I. Kreasi Wacana. Bantul.
- Phillipus M. Hadjon. 1998. “Tentang Wewenang Pemerintahan (*Bestuurbevoegdheid*)”. *Pro Justisia Tahun XVI Nomor 1*.
- Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan, *Pembagian Kewenangan Pusat dan Daerah Sektor Pertambangan Minerba dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara*. <https://pushep.or.id/pembagian-kewenangan-pusat-dan-daerah-sektor-pertambangan-minerba-dalam-perspektif-hukum-administrasi-negara/> diakses 15 Januari 2023.
- _____, *Sentralisasi Sektor Pertambangan Jadikan Daerah Tidak Merasa Memiliki dan Peduli Terhadap Dampak Lingkungan*, <https://pushep.or.id/sentralisasi-sektor-pertambangan-jadikan-daerah-tidak-merasa-memiliki-dan-peduli-terhadap-dampak-lingkungan/> diakses 17 Januari 2023.
- Risao Alfredo. 2020. “Disharmonisasi Antara UU No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara dengan UU 23 Tahun 2014 Terkait Kewenangan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batu Bara Oleh Pemerintah Pusat”. *Jurnal Independent Fakultas Hukum Universitas Lampung Mangkurat*.
- Rizkyana Zaffrindra Putri. et. all. 2015. “Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara”. *Jurnal Hukum Volume 11 Nomor 1*.
- S. Safitri. 2016. “Sejarah Perkembangan Otonomi Daerah di Indonesia”. *Jurnal Pendidikan Sejarah Volume 5 Nomor 1. Crikestra*.
- S.N Solechah. 2012. “Realisasi Desentralisasi Sektor Pertambangan”. *Jurnal Info Singkat Pemerintahan Dalam Negeri*.
- Thomas Hentschel (Bolivia). Felix Hruschka (Peru). Michael Priester (Germany). 2002. “Global Report of Artisanal and Small Scale Mining”. *MMSD and IIED Paper Number 72*.
- Ulber Silalahi dan Wirman Syafri. 2015. *Desentralisasi dan Demokrasi Pelayanan Publik; Menuju Pelayanan Pemerintah Daerah. Lebih Transparan. Partisipatif. Responsif dan Akuntabel*. IPDN Press. Sumedang.
- Yuni Yanti dan Bahder Johan Nasution. 2021. “Fungsi Wakil Kepala Daerah Dalam Menyelenggarakan Pemerintahan Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah”. *Limbago: Journal of Constitutional Law*.

Zsazsa Dordia Arinanda. 2021. “Sentralisasi Kewenangan Pengelolaan Dan Perizinan Dalam Revisi Undang-Undang Mineral Dan Batubara”. *Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Universitas Riau Volume 10 Nomor 1*.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Republik Indonesia. *Undang-Undang Dasar 1945*.

_____*Undang-Undang Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Agraria. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960.*

_____*Undang-Undang Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009.*

_____*Undang-Undang Tentang Pemerintahan Daerah. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.*

_____*Undang-Undang Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009. Undng-Undang Nomor 3 Tahun 2020.*

_____*Peraturan Pemerintah Tentang Wilayah Pertambangan. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010.*

_____*Peraturan Pemerintah Tentang Pelaksananaa Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021.*

_____*Peraturan Presiden Tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Dan Batubara. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022.*

_____*Keputusan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Tentang Rencana Pengelolaan Mineral dan Batubara Nasional Tahun 2022-2027. Keputusan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 301.K/MB.01/MEM.B/2022.*